

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, dunia menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Laju degradasi lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran, serta penurunan keanekaragaman hayati, telah menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang luas (Rahmawati A. Damiti dkk., 2025). Kondisi ini mendorong urgensi penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menuntut sinergi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan (Vioreza dkk., 2023)

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan hayati yang melimpah dan memiliki beragam kawasan konservasi yang dikembangkan sebagai objek wisata alam. Kawasan ini tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga bernilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar (Muhammad Khaidir Kahfi Natsir & Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak, 2024). Namun, banyak kawasan tersebut menghadapi tekanan dari aktivitas manusia, baik berupa eksploitasi sumber daya maupun pariwisata yang tidak berkelanjutan. Hal ini menciptakan kebutuhan akan model pengelolaan yang mampu menyeimbangkan kepentingan konservasi dan pembangunan (Suwita dkk., 2025). Pendekatan tata kelola



Optimized using
trial version
www.balesio.com

partisipatif menjadi salah satu solusi yang banyak
dipromosikan oleh para ahli. Kolaborasi dianggap mampu
mempromosikan keterlibatan berbagai aktor dalam
merencanakan dan menjalankan kebijakan bersama. Model ini

menjadi semakin relevan ketika kompleksitas persoalan lingkungan dan sosial tidak bisa diatasi secara sektoral (Astuti dkk., 2020).

Dalam konteks ini, kawasan konservasi, termasuk Taman Wisata Alam (TWA), memiliki peran strategis sebagai ruang ekologi yang tidak hanya melindungi keragaman hayati tetapi juga menyediakan jasa lingkungan yang esensial. Taman-taman ini berfungsi sebagai penyangga terhadap perubahan iklim, sumber edukasi lingkungan, serta daya tarik wisata berbasis alam yang mampu mendorong perekonomian lokal secara berkelanjutan (Samsudewa Retno Iswarin Pujaningsih Yon Supri Ondho, t.t.), Selain itu, kawasan konservasi juga dinilai memiliki nilai budaya dan simbolik yang tinggi. Sebagai contoh, banyak taman nasional dan TWA di dunia diakui sebagai model konkret dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek perlindungan ekosistem darat (*Goal 15*), pemberdayaan masyarakat lokal *Goal 11*, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan *Goal 8* (Jatna Supriatna, 2024).

Taman Wisata Alam Sumpang Bitu yang berada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, merupakan kawasan konservasi yang memiliki potensi luar biasa baik dari segi ekologi, arkeologi, maupun budaya lokal. Kawasan ini dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan (BPK) namun dalam praktiknya masih dijumpai berbagai dalam pengelolaan (Fathu Rahman, 2024).



Optimized using
trial version
www.balesio.com

keterlibatan masyarakat lokal dan aktor non- dalam proses pengambilan keputusan menjadi persoalan penting. Padahal, peran masyarakat

dalam pelestarian kawasan sangat strategis, terutama karena mereka tinggal berdampingan langsung dengan wilayah konservasi. Selain itu, belum tampaknya sinergi yang kuat antara lembaga pemerintah, pelaku usaha wisata, dan komunitas setempat menjadi perhatian (Lily Sri Ulina Peranginangin, 2014). Keterbatasan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan memperburuk efektivitas tata kelola. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kerangka kerja kolaboratif secara nyata di Sumpang Bitu (Laway dkk., 2025).

Namun, hingga saat ini pengelolaan TWA Sumpang Bitu masih menghadapi persoalan mendasar. Pertama, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan masih terbatas dan seringkali hanya diposisikan sebagai pelaksana, bukan pengambil keputusan. Kedua, koordinasi antar lembaga pemerintah, baik BKP Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Pangkep, belum berjalan efektif, sehingga program konservasi dan pariwisata kerap berjalan sendiri-sendiri. Ketiga, forum kolaborasi multipihak yang idealnya menjadi wadah komunikasi dan konsensus bersama belum terbangun secara berkelanjutan, sehingga kolaborasi yang ada cenderung formalitas (*tokenism*). Keempat, terdapat ketimpangan akses sumber daya dan informasi antar aktor, yang memperlemah kepercayaan (*trust*) dan menghambat terciptanya tata kelola inklusif. Kondisi ini



atakan bahwa prinsip collaborative governance, menekankan partisipasi sejajar, komunikasi deliberatif, pimpinan fasilitatif, belum sepenuhnya terwujud di

Sumpang Bitu.

Secara empiris, banyak kawasan konservasi di Indonesia menghadapi masalah serupa, yaitu lemahnya koordinasi dan dominasi aktor negara dalam pengambilan kebijakan (Wibowo & Giessen, 2015). Penelitian oleh (Dwita Indah Pawasti, 2021) menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi di Jawa Barat tidak berhasil mencapai target karena rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya komitmen antar lembaga (Setiawan, 2021). Kegagalan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola yang bersifat kolaboratif. Tidak hanya dalam hal partisipasi formal, tetapi juga dalam penyusunan visi bersama dan pembagian peran yang jelas antar pihak (Mimin Sundari Nasution dkk., 2022). Tanpa hal tersebut, pengelolaan akan cenderung bersifat top-down dan tidak berkelanjutan. Hal ini relevan dengan situasi di Sumpang Bitu yang menghadapi dinamika aktor dan kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang pola kolaborasi di kawasan ini menjadi mendesak (C. , & G. A. Ansell, 2007).

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pendekatan *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan ekologi dan sosial yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah (Lawasi dkk., 2024). *Collaborative governance*



manajemen sumber daya (C. Ansell & Gash, 2008a).

Dari sisi teori, *collaborative governance* seperti dikemukakan (C. Ansell & Gash, 2008a) menekankan pentingnya pengambilan keputusan bersama melalui proses dialog dan konsensus. Model ini memerlukan keterlibatan aktif dari aktor pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha dalam suatu forum formal maupun informal. Namun, dalam praktiknya, implementasi teori ini tidak selalu berhasil karena bergantung pada beberapa prasyarat penting seperti kepercayaan, komitmen, dan sumber daya bersama (C. Ansell & Gash, 2008b).

Lebih jauh, *collaborative governance* berkembang sebagai respon terhadap kegagalan pendekatan top-down yang birokratis dan cenderung eksklusif, serta untuk menanggapi kebutuhan akan legitimasi dan efektivitas dalam pengelolaan lingkungan (Dupuy & Defacqz, 2022). Di sektor konservasi dan pengelolaan kawasan alam, pendekatan ini memungkinkan pembagian tanggung jawab dan sumber daya, pemanfaatan pengetahuan lokal, serta membangun kepercayaan sosial antar aktor (Rapp, 2020). Model ini juga mengintegrasikan nilai-nilai deliberatif dan partisipatif dalam pembuatan kebijakan, yang dianggap meningkatkan kualitas kebijakan publik dan kepatuhan terhadap implementasinya (Emerson dkk., 2012a).



Dalam praktiknya, *collaborative governance* dalam taman nasional, kawasan konservasi, dan taman rim dapat memperkuat keberlanjutan ekologis memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal bergantung hidupnya pada kawasan tersebut

(Massiri dkk., 2024). Ini termasuk pendekatan co-management, kolaborasi multi-level, dan pembentukan forum multipihak yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas (Indri Fogar Susilowati dkk., 2023). Taman Wisata Alam Sumpang Bitu, sebagai bagian dari kawasan karst Maros–Pangkep, tidak hanya menyimpan nilai ekologis tetapi juga kekayaan sejarah berupa gua prasejarah dengan lukisan tangan manusia purba (Nur Ainun, 2023; Kemendikbudristek, 2021).

Namun demikian, seperti banyak kawasan konservasi lain di Indonesia, TWA Sumpang Bitu menghadapi tantangan serius, seperti vandalisme situs, rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya infrastruktur wisata ramah lingkungan, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga rendahnya kepercayaan antar pihak (Ditjen KSDAE, 2024;Yusriana, 2022). Padahal, kawasan ini juga memiliki peluang besar sebagai kawasan ekowisata berbasis komunitas yang mengandalkan kearifan lokal dan budaya seperti upacara adat *Mappalili* (Kia, 2021; Antara News Makassar, 2021). Hal ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan kawasan semacam ini tidak cukup jika hanya dilakukan oleh satu pihak seperti pemerintah atau dinas kehutanan saja (Antara News Makassar, 2021).

Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* menjadi alternatif strategis dalam memperkuat sinergi antar pihak dari BPK, pemerintah daerah, masyarakat adat, pelaku wisata dan akademisi.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

bagian besar penelitian tentang *collaborative governance* masih berfokus pada perkotaan atau sektor

pelayanan publik. Konteks kawasan konservasi, khususnya TWA, masih jarang disentuh. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan teoritik sekaligus kebutuhan empiris untuk mengkaji bagaimana pola kolaborasi multipihak dibangun di kawasan konservasi yang unik seperti TWA Sumpang Bitu (Bodin, 2017; Doerr & Taylor Aiken, 2021) & Taylor Aiken, 2021; Dr. Ani Nuraini, 2025)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul: “Collaborative Governance dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu Kabupaten Pangkep.”

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilandasi oleh pentingnya pengelolaan kawasan konservasi yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu Kabupaten Pangkep?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu Kabupaten Pangkep?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian



mengetahui dan menggambarkan bagaimana *collaborative governance* dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu Kabupaten Pangkep.

mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang

mempengaruhi penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu Kabupaten Pangkep.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.

A. Manfaat Teoritis

penelitian ini akan memperkaya kajian akademik di bidang ilmu pemerintahan dan kebijakan publik dengan mengaplikasikan konsep *collaborative governance* dalam konteks pengelolaan lingkungan dan kawasan konservasi. Selama ini, studi tentang *collaborative governance* di Indonesia masih didominasi oleh konteks layanan publik dan perkotaan, sehingga penelitian ini menjadi relevan sebagai bentuk perluasan pendekatan kolaboratif ke ranah pengelolaan kawasan wisata alam berbasis nilai-nilai lokal dan ekologi. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis untuk kajian-kajian sejenis di masa mendatang.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi para pengambil kebijakan, khususnya pemerintah daerah, Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan (BPK), serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem tata kelola yang lebih terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan. Temuan mengenai faktor pendukung dan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

at kolaborasi dapat dijadikan dasar dalam merancang
unikasi multipihak, menyusun strategi pemberdayaan
t, dan memperkuat koordinasi kelembagaan di
Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam

pengembangan model kebijakan konservasi yang adaptif terhadap karakteristik sosial dan budaya lokal.

1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi memberikan landasan konseptual dan akademik bagi penelitian ini. Melalui kajian pustaka, penulis menelaah teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *Collaborative Governance* dalam pengelolaan kawasan konservasi. Fokus utama tinjauan ini adalah memahami dinamika tata kelola pemerintahan, kolaborasi antaraktor, serta peran masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu Kabupaten Pangkep.

Kajian pustaka dalam penelitian ini mengacu pada beberapa kerangka teoretis. Pertama, konsep governance yang menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan, distribusi kewenangan, dan relasi antaraktor dibangun untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, teori *collaborative governance* yang dipelopori Ansell & Gash (2008) serta Emerson, Nabatchi & Balogh (2012), yang menekankan pentingnya kerja sama antaraktor dalam pengelolaan isu-isu kompleks, termasuk konservasi lingkungan. Ketiga, teori kolaborasi multiaktor melalui model *Triple Helix* yang dalam konteks ilmu pemerintahan Indonesia dapat dimodifikasi menjadi interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang *collaborative governance* bekerja secara kolaboratif, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.



Collaborative Governance

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Collaborative Governance adalah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan berbagai proses, struktur, dan aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, baik itu dalam konteks publik, swasta, atau masyarakat sipil. Konsep *governance* telah berkembang pesat dalam studi administrasi publik dan ilmu politik, karena menanggapi kebutuhan untuk mengelola tantangan kompleks yang dihadapi oleh negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam berbagai isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. *Governance* seringkali terkait dengan sistem pemerintahan, tetapi juga mencakup cara-cara alternatif dalam mengambil keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Anne Mette Kjaer, 2023).

Governance lebih dari sekadar sistem pemerintahan atau kebijakan. Konsep ini merujuk pada cara-cara untuk mengelola hubungan antar aktor yang memiliki kepentingan dalam berbagai isu atau permasalahan, terutama yang menyangkut kepentingan publik dan sumber daya alam. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya alam, seperti kawasan wisata alam, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama yang berkelanjutan (van Zeijl-Rozema dkk., 2008a).

Pada dasarnya, *governance* mencakup prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi berarti proses pengambilan keputusan harus dapat diakses oleh masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dapat dipahami dan dikontrol oleh publik. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban aktor yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang diambil. Sedangkan, partisipasi merujuk pada aktif semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, aktor swasta, dalam setiap tahap proses pengelolaan dan kebijakan (Fitz-Gerald & Leach, 2011).

Selain itu, teori *governance* modern menekankan pentingnya desentralisasi dan devolusi kekuasaan. Pendekatan ini memberi lebih banyak ruang bagi masyarakat lokal dan sektor non-pemerintah untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dengan desentralisasi, kekuasaan tidak hanya terkonsentrasi pada pemerintah pusat atau otoritas tunggal, tetapi dibagi dengan aktor lain di tingkat lokal yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang konteks dan kebutuhan setempat. Ini memberikan keunggulan dalam pengelolaan sumber daya alam karena dapat memfasilitasi respons yang lebih cepat dan relevan terhadap permasalahan yang muncul di lapangan (van Zeijl-Rozema dkk., 2008b).

Kejelasan konsep *governance* juga tercermin dalam pembagian teori-teori yang ada, salah satunya yang dikemukakan oleh Kjaer (2023) yang menyebutkan bahwa *governance* tidak hanya berfokus pada hubungan antara negara dan masyarakat, tetapi juga tentang keterlibatan berbagai pihak yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini penting karena saat ini banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja, seperti dalam hal pengelolaan sumber daya alam, yang memerlukan pendekatan lintas sektoral dan kolaboratif. Dengan demikian, *governance* menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola dan mencapai tujuan bersama yang lebih berkelanjutan.

Kejelasan konsep *governance* juga tercermin dalam pembagian teori-teori yang ada, salah satunya yang dikemukakan oleh (Anne Mette Kjaer, 2023) yang menyebutkan bahwa



Optimized using
trial version
www.balesio.com

tidak hanya berfokus pada hubungan antara negara dan masyarakat, tetapi juga tentang keterlibatan berbagai pihak berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini penting karena saat ini banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh

satu aktor saja, seperti dalam hal pengelolaan sumber daya alam, yang memerlukan pendekatan lintas sektoral dan kolaboratif. Dengan demikian, *governance* menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola dan mencapai tujuan bersama yang lebih berkelanjutan (Anne Mette Kjaer, 2023).

Dalam konteks Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu, konsep *governance* sangat relevan karena pengelolaan kawasan ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pengelola kawasan, pelaku wisata, serta masyarakat lokal. *Collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif merupakan salah satu model yang mengedepankan sinergi antara aktor-aktor ini. Melalui kolaborasi yang efektif, berbagai tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti konflik kepentingan, kurangnya koordinasi, dan ketidakpastian regulasi dapat diatasi dengan lebih baik.

Dalam pengelolaan kawasan wisata alam, seperti Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu, pendekatan *governance* yang efektif memerlukan kolaborasi antar lima aktor utama yang dikenal dengan sebutan *Triple Helix*. *Triple Helix* terdiri dari pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Setiap aktor ini memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan pengembangan sektor wisata yang berkelanjutan.

Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengatur yang harus memastikan bahwa kebijakan pengelolaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Akademisi melalui penelitian yang dapat memberikan dasar untuk pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan.



Pengusaha, terutama pelaku industri pariwisata, berperan dalam mengembangkan wisata yang bertanggung jawab dan mendukung ekonomi lokal tanpa merusak lingkungan. Masyarakat, sebagai pemangku kepentingan utama, harus diberdayakan untuk turut serta dalam pengelolaan kawasan, memberikan masukan, dan merasakan manfaat langsung dari keberlanjutan kawasan tersebut.

Menurut (Kurniadi & Ibrahim, 2023), keberhasilan *governance* dalam pengelolaan kawasan konservasi sangat bergantung pada bagaimana interaksi antar aktor yang dikelola. Jika setiap aktor dapat saling bekerja sama dengan transparansi dan akuntabilitas, maka *governance* akan menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga sah secara sosial dan legitimasi(Kurniadi & Ibrahim, 2023).

Dengan semakin banyaknya tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan wisata alam, terutama dalam menghadapi isu-isu lingkungan, *governance* menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Di sisi lain, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya terkait dengan kebutuhan untuk meminimalkan dampak lingkungan, tetapi juga dalam menjamin adanya manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penerapan prinsip *governance* yang baik akan memastikan adanya keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi yang inklusif.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

bagai contoh, dalam kasus TWA Sumpang Bitu, pengelolaan kawasan yang melibatkan berbagai aktor dengan koordinasi akan memfasilitasi tercapainya tujuan bersama, yaitu pembangunan kawasan sambil mendorong pembangunan

ekonomi wisata yang dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Anne Mette Kjaer, 2023) yang menjelaskan bahwa *governance* yang baik dapat menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan, serta mampu menjaga integritas sosial dan ekologis.

1.4.2. Teori *Collaborative Governance*

Konsep *collaborative governance* muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan pemerintahan tradisional yang bersifat hierarkis dalam menghadapi permasalahan kebijakan publik yang kompleks dan lintas sektor. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan berbagai aktor baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil dalam suatu proses bersama untuk mencapai tujuan publik. Istilah ini menjadi semakin populer setelah dipopulerkan oleh Ansell dan Gash (2008) yang mendefinisikannya sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor lintas batas kelembagaan secara kolektif (C. Ansell & Gash, 2008c).

Model kolaboratif ini memiliki empat dimensi utama menurut Ansell dan Gash, yaitu: (1) *face-to-face dialogue*; (2) *trust-building*; (3) *commitment to the process*; dan (4) *shared understanding*. Mereka menekankan bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat bergantung pada kondisi awal yang ada, seperti sejarah kerja sama, ketimpangan kekuasaan, dan kapasitas bersama (C. Ansell & Gash, 2008c).



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sementara itu, (Emerson dkk., 2012b) mengembangkan *Framework for Collaborative Governance*, yang mencakup elemen sistemik seperti kapasitas institusional,

dinamika pengaturan, dan tindakan kolaboratif. Mereka menekankan pentingnya *collaborative dynamics* termasuk keterlibatan pihak, tujuan bersama, dan hasil Bersama dalam menciptakan *governance regime* yang adaptif dan berkelanjutan. Kerangka ini bersifat lebih struktural dan menekankan pentingnya interaksi sosial dan sistem nilai dalam menciptakan tata kelola yang kolaboratif (Emerson dkk., 2012b).

Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menelaah bagaimana kolaborasi dapat meningkatkan efektivitas tata kelola dalam konteks pengelolaan kawasan wisata alam seperti Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu di Kabupaten Pangkep. Dalam konteks lokal, pendekatan ini memberikan arah untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat adat, komunitas lokal, sektor swasta, dan organisasi lingkungan (C. Ansell & Gash, 2008d).

(McIvor, 2020) dalam artikelnya yang berjudul *Toward a Critical Theory of Collaborative Governance* mengemukakan bahwa *collaborative governance* adalah suatu bentuk pendekatan pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan atau permasalahan bersama. Menurut McIvor, kolaborasi yang efektif di dalam tata kelola pemerintahan bukan hanya bergantung pada proses komunikasi

ka, tetapi juga pada kepercayaan dan akuntabilitas antar terlibat.

im konteks pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Bitu, penerapan *collaborative governance* dapat



memperkuat keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha wisata, dalam merumuskan kebijakan dan pengelolaan kawasan konservasi. Mclvor juga menekankan bahwa keberhasilan suatu model *collaborative governance* sangat bergantung pada pembentukan jaringan kerja yang dapat menciptakan sinergi antar aktor. Oleh karena itu, pendekatan ini harus melibatkan diskusi terbuka, dialog yang konstruktif, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan yang lebih besar, yakni kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi (Mclvor, 2020).

Selain itu, (Mclvor, 2020) menyebutkan bahwa penerapan *collaborative governance* yang efektif membutuhkan komitmen dari seluruh aktor untuk beradaptasi dengan dinamika dan kompleksitas tugas yang dihadapi. Dalam hal ini, TWA Sumpang Bitu, yang memiliki karakteristik alam yang khas, memerlukan pendekatan kolaboratif yang tidak hanya fokus pada pengelolaan konservasi, tetapi juga memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi wisata yang berkelanjutan. Sinergi antar berbagai pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan konservasi, tetapi juga kebutuhan masyarakat lokal dan pelaku industri wisata (Mclvor, 2020).

Dengan demikian, penerapan teori *collaborative governance* menurut (Mclvor, 2020) dalam pengelolaan TWA Sumpang Bitu sangat relevan untuk memperkuat kolaborasi antar terlibat, serta menciptakan sebuah sistem pengelolaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Collaborative Governance mengemukakan bahwa *collaborative governance* berfokus pada pemberdayaan (*empowerment*) anggota masyarakat dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan bersama. Menurut mereka, kekuatan utama dari *collaborative governance* terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam dan perencanaan kebijakan yang terkait (Adeniran dkk., 2008).

Dalam konteks Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu, penerapan *collaborative governance* yang memperhatikan *empowerment* ini dapat menjadi kunci untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan kawasan. Larkin dan Cierpial (2008) berpendapat bahwa kolaborasi yang efektif harus menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan memperkuat rasa memiliki terhadap kawasan wisata, serta mendukung terciptanya keberlanjutan pengelolaan kawasan tersebut (Adeniran dkk., 2008).

Larkin dan Cierpial juga menekankan bahwa salah satu elemen penting dalam *collaborative governance* adalah peran fasilitator netral yang dapat menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan. Fasilitator ini memiliki tugas mengelola dinamika konflik, menjaga keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa suara semua pihak, termasuk masyarakat lokal, didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pengelolaan TWA



Sumpang Bitu yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku wisata, dan masyarakat setempat dapat memanfaatkan fasilitator netral untuk menciptakan proses yang lebih inklusif, akuntabel, dan adil (Adeniran dkk., 2008).

Dengan demikian, *collaborative governance* menurut Larkin dan Cierpial (2008) dapat memberikan kontribusi besar dalam pengelolaan TWA Sumpang Bitu, dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif dan legitimatif. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan kawasan akan memperkuat sinergi antar aktor yang terlibat dan menciptakan model pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan partisipatif (Adeniran dkk., 2008).

1.4.3. Kolaborasi *Triple Helix* dalam Ilmu Pemerintahan

Konsep *triple helix* yang menekankan interaksi antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, dan industri. Dalam kajian pemerintahan di Indonesia, model ini dianggap relevan karena mampu menjelaskan dinamika kolaborasi multipihak dalam mengatasi persoalan yang kompleks, termasuk pengelolaan kawasan wisata alam yang melibatkan kepentingan konservasi, ekonomi, dan sosial-budaya.

Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi dan pariwisata berkelanjutan, model *triple helix* sangat relevan untuk diterapkan. (Subair dkk., 2025a) menjelaskan bahwa keterlibatan aktor kolaborasi dapat memastikan keberlanjutan pengelolaan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

wisata alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal. Misalnya, t yang tinggal di sekitar kawasan Taman Wisata Alam Sumpang Bitu memiliki peran penting dalam menjaga

kelestarian kawasan, sementara sektor swasta dapat mendukung pengembangan wisata berbasis komunitas yang ramah lingkungan.

Model triple helix juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. (Bevir, 2009) menyatakan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas antaraktor merupakan kunci dalam menciptakan kebijakan yang sah secara sosial dan berlegitimasi. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana pengelolaan kawasan wisata alam sering menghadapi konflik kepentingan antara konservasi dan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip *triple helix*, setiap aktor diberi ruang untuk berkontribusi secara setara, sehingga kolaborasi yang terbentuk tidak hanya bersifat formalitas tetapi mampu menghasilkan keputusan bersama yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun unsur-unsur *triple helix* dalam pengelolaan taman wisata alam (TWA) sumpang bita antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat

Berperan sebagai pemegang otoritas utama dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk Taman Wisata Alam (TWA). Pemerintah pusat melalui kementerian teknis seperti Kementerian kebudayaan (Balai Pelestarian Kebudayaan Sulsel) menetapkan regulasi, standar pengelolaan, dan kebijakan konservasi yang berlaku secara nasional.



Pemerintah Pusat memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk Taman Wisata Alam (TWA), karena mereka bertanggung jawab atas penerapan kebijakan yang bersifat nasional dan menetapkan

kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Melalui kementerian terkait, seperti Kementerian kebudayaan (Balai Pelestarian Kebudayaan Sulsel), pemerintah pusat menetapkan peraturan yang menjadi pedoman untuk pengelolaan kawasan, seperti pengelolaan hutan, taman nasional, dan TWA, yang termasuk dalam kategori kawasan konservasi.

Selain itu, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan dalam penetapan status kawasan konservasi, yang mencakup perlindungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Misalnya, Balai Pelestarian Kebudayaan Sulsel) mengatur berbagai kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati, yang diharapkan dapat menjaga kelestarian ekosistem di kawasan tersebut. Salah satu regulasi penting yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan konservasi.

Dalam konteks TWA Sumpang Bitu, peran pemerintah pusat sangat penting dalam mengatur standar pengelolaan yang mencakup aspek konservasi, pariwisata, serta kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah pusat juga bertugas untuk mengalokasikan anggaran untuk program-program konservasi yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan tersebut, baik dalam bentuk pendanaan maupun dukungan teknis.

Selain kebijakan dan regulasi, pemerintah pusat juga berperan dalam memberikan otoritas dan izin untuk



pembangunan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan di kawasan TWA, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat menjadi penanggung jawab utama dalam menciptakan kerangka kerja yang memastikan pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi tetapi juga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka pengelolaan TWA Sumpang Bitu dapat berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, menjaga keseimbangan antara konservasi dan pengembangan pariwisata, serta melibatkan semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam pengelolaannya.

b. Pemerintah Daerah

Berfungsi sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah, serta memastikan pengelolaan kawasan konservasi selaras dengan pembangunan daerah, termasuk pariwisata, ekonomi lokal, dan tata ruang.

Pemerintah Daerah memegang peran krusial sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal yang mendukung implementasi kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai pihak yang paling dekat dengan kondisi lokal, pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam memahami kebutuhan spesifik masyarakat, serta tantangan dan potensi daerah terkait pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu, salah satu tugas utama pemerintah daerah adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan yang



mengintegrasikan pedoman dari pemerintah pusat dengan kondisi dan prioritas daerah.

Dalam konteks Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengadaptasi kebijakan nasional ke dalam rencana pembangunan daerah yang berfokus pada konservasi, pariwisata, dan pengembangan ekonomi lokal. Hal ini termasuk merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata tanpa mengorbankan kelestarian alam. Pemerintah daerah juga bertugas untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan kawasan konservasi dan kepentingan pembangunan daerah, termasuk dalam tata ruang dan penggunaan lahan, yang sangat penting untuk memastikan pengembangan kawasan yang berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan mengatur pemanfaatan kawasan, seperti izin untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, pengelolaan fasilitas umum, dan peraturan terkait wisata berbasis alam yang bertanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk mencegah overeksploitasi dan memastikan bahwa sektor pariwisata berkembang secara berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah daerah juga berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan pemerintah pusat dengan masyarakat lokal serta sektor swasta. Mereka memainkan peran penting memastikan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan pariwisata disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat agar mereka dapat terlibat secara aktif dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi keberlanjutan kawasan



tersebut. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pengelolaan kawasan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, seperti melalui pelatihan, pemberdayaan, dan peluang kerja yang dihasilkan dari pengembangan sektor pariwisata.

Selain itu, pemerintah daerah berfungsi sebagai pengawas dan penegak kebijakan lokal, yang bertanggung jawab atas implementasi program-program konservasi yang berjalan di tingkat lokal. Mereka juga memastikan bahwa sumber daya alam di kawasan tersebut dikelola dengan prinsip keberlanjutan, termasuk dalam mengatasi isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi yang timbul dari kegiatan pengelolaan kawasan.

c. Masyarakat

Berperan langsung sebagai subjek sekaligus objek dalam pengelolaan TWA. Keterlibatan masyarakat lokal penting karena mereka yang paling dekat dengan kawasan, baik dalam aktivitas ekonomi (seperti wisata dan UMKM), sosial budaya, maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam konteks *collaborative governance*, ketiga aktor ini perlu membangun pola hubungan yang saling melengkapi: pemerintah pusat memberikan regulasi, pemerintah daerah memastikan implementasi, dan masyarakat berpartisipasi aktif. Interaksi tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola Taman Wisata Alam yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.



Masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang tinggal di kawasan Taman Wisata Alam (TWA), memegang peran sangat vital dalam pengelolaan kawasan tersebut.

Sebagai subjek dan objek dalam pengelolaan, masyarakat tidak

hanya terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga menjadi pihak yang berperan dalam menjaga kelestarian alam dan sumber daya yang ada di kawasan tersebut. Keberadaan masyarakat lokal yang secara langsung berinteraksi dengan ekosistem kawasan menjadikan mereka sebagai pihak yang memiliki pengetahuan tradisional yang berharga dalam konservasi.

Keterlibatan masyarakat dalam *collaborative governance* mencakup peran aktif mereka dalam berbagai aspek pengelolaan kawasan, seperti pengambilan keputusan terkait kebijakan, pemantauan lingkungan, serta pelaksanaan program-program yang mendukung keberlanjutan kawasan. (Subair dkk., 2025b) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan kawasan konservasi adalah salah satu elemen penting dalam keberhasilan tata kelola yang efektif. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang sangat berguna dalam mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan dan merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks lokal.

Masyarakat juga berperan dalam mengurangi konflik kepentingan yang sering terjadi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan. Mereka menjadi pihak yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan sektor swasta serta membantu menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan yang ada di kawasan. Partisipasi masyarakat tidak terbatas pada kegiatan sosial budaya tetapi juga dalam perencanaan dan penegakan hukum terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan TWA. Dengan



demikian, masyarakat menjadi agen pengawas yang membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap menjaga keseimbangan antara konservasi dan pembangunan.

Dalam konteks TWA Sumpang Bitu, partisipasi aktif masyarakat sangat penting, terutama dalam mengelola sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pelibatan mereka dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan daerah sangat membantu dalam memastikan bahwa program-program pariwisata yang dikembangkan tidak hanya menguntungkan sektor wisata, tetapi juga membawa manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal, seperti dalam bentuk peningkatan kapasitas dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan konflik yang mungkin timbul antara kepentingan pariwisata dan konservasi. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga kawasan tersebut, masyarakat lebih mudah diajak untuk berperan serta dalam menjaga kelestarian alam, serta melibatkan diri dalam pengembangan wisata berbasis komunitas yang mengutamakan keberlanjutan.

Dalam hubungan ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam pengelolaan TWA. Dengan cara ini, interaksi antar ketiga aktor pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan keberlanjutan.



Pikir

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengelolaan kawasan konservasi seperti Taman Wisata

Alam (TWA) Sumpang Bitu merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan: pelestarian lingkungan, pengembangan pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kewenangan lintas pemerintahan. Kompleksitas ini tidak dapat ditangani hanya oleh satu aktor, melainkan membutuhkan pola tata kelola kolaboratif.

Dalam kajian ilmu pemerintahan, *governance* dipahami sebagai suatu mekanisme penyelenggaraan urusan publik yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas. Sejalan dengan itu, konsep *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2008) menekankan pada pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator dan katalis kolaborasi. Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) menambahkan bahwa kolaborasi efektif membutuhkan *principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action*.

Dalam konteks TWA Sumpang Bitu, aktor yang terlibat dapat dipetakan melalui kerangka *triple helix* yang dimodifikasi menjadi interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah pusat berperan menetapkan regulasi dan kebijakan konservasi, pemerintah daerah memastikan implementasi di level lokal, sementara masyarakat menjadi pihak yang paling dekat dengan kawasan dan memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan pengelolaan.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Angka pikir ini menuntun penulis untuk menganalisis kolaborasi yang terjadi di lapangan, mengidentifikasi kelemahan tata kelola, serta memahami dinamika yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi

tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, sekaligus kontribusi praktis dalam perbaikan tata kelola konservasi di daerah.

Gambar 1. 1. Kerangka Konseptual



BAB II METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam pengelolaan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Sumpang Bitu di Kabupaten Pangkep.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2017), “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” (hlm. 2). Cara ilmiah tersebut mengandung unsur rasional, empiris, dan sistematis. Artinya, proses penelitian harus dilakukan dengan logika berpikir yang benar, dapat diuji secara nyata di lapangan, dan mengikuti prosedur tertentu yang runtut dan konsisten.

Dalam konteks ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini dipilih agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendalam tentang bagaimana proses kolaborasi berlangsung, siapa saja aktor yang terlibat, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam implementasi governance kolaboratif.

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam satu unit kasus spesifik, yakni pengelolaan kolaboratif TWA Sumpang Bitu, dengan mempertimbangkan seluruh dimensi sosial, kelembagaan, dan ekologis yang terkait. Menurut Yin (2018), pendekatan studi kasus



ini digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” (why) suatu proses sosial terjadi, terutama dalam kasus yang melibatkan banyak aktor dan interaksi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri proses

pelibatan aktor, dinamika kerja sama, konflik yang muncul, serta efektivitas tata kelola kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan kawasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif partisipan, dalam hal ini aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Jenis penelitian ini cocok digunakan untuk mengkaji makna, proses interaksi, dinamika kekuasaan, serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap praktik *collaborative governance* yang berlangsung di Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu. Penelitian ini tidak berorientasi pada generalisasi angka, melainkan berfokus pada pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang kompleks dan nyata di lapangan.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu, yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan (BPK), Sulawesi Selatan dan termasuk dalam bagian Geopark Maros–Pangkep, yang telah diakui sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGp).

TWA Sumpang Bitu dipilih sebagai lokasi penelitian karena kawasan ini memiliki keunikan ekologis, geologis, dan kultural yang tinggi. Terdapat peninggalan arkeologis berupa lukisan prasejarah di



ig gua, keanekaragaman hayati khas kawasan karst, i wisata alam yang terus dikembangkan. Dengan tersebut, TWA Sumpang Bitu menjadi ruang strategis yang tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif antara

berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat lokal, komunitas budaya, pelaku wisata, serta lembaga swadaya masyarakat.

Pemilihan lokasi ini juga didasari oleh kebutuhan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip *collaborative governance* diterapkan dalam konteks lokal, khususnya dalam menghadapi tantangan konservasi di tengah geliat pariwisata dan tekanan pembangunan. TWA Sumpang Bitu merupakan studi kasus yang representatif karena mencerminkan dinamika kolaboratif antara pemerintah daerah, otoritas konservasi, komunitas lokal, dan aktor non-negara lainnya.

Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan, termasuk penelitian langsung di lapangan, pengumpulan data, dan pengolahan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

2.3. Sumber Data

Menurut (Arikunto, 1998), sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang diperoleh dari:

a. Data Primer

Menurut Hasan (2002) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini merupakan data-data yang dihasilkan melalui wawancara dan observasi dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada (Hasan, 2002:58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh dari bahan pustaka, literatur penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Yang termasuk data sekunder



adalah dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (Data dokumenter).

2.4. Informan Penelitian

Adapun Informan Penelitian ini antara lain:

- Ketua Tim Pelestarian Gua-Gua Prasejarah Sulawesi Selatan
- Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Pangkep
- Lurah Sumpang Bitu
- Tokoh Masyarakat

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) dalam penelitian kualitatif bahwa pengumpulan data dilakukan dalam kondisi yang alamiah, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam informasi tentang implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu. Untuk memperoleh data yang komprehensif dan kontekstual, digunakan tiga teknik utama: observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

a. Observasi Langsung

Menurut Suwandi & Basrowi (2008), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan yang dijadikan objek penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh data langsung dan dapat dikatakan bahwa data asli atau valid.



Observasi langsung dilakukan untuk menangkap sosial dan perilaku yang terjadi di lapangan. Peneliti

mengamati dinamika interaksi antar pemangku kepentingan, kegiatan konservasi dan wisata, serta situasi fisik dan sosial kawasan. Observasi ini bersifat partisipatif non-intervensi, sehingga memungkinkan peneliti memahami konteks secara alami dan mendalam.

b. Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara semi terstruktur kepada berbagai informan kunci yang terlibat dalam pengelolaan TWA Sumpang Bitu. Informan tersebut mencakup pejabat dari Balai BPK Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep, pemerintah desa setempat, tokoh adat, pelaku usaha wisata. Teknik ini bertujuan untuk memahami persepsi, peran, dan pengalaman masing-masing aktor dalam proses kolaborasi pengelolaan kawasan.

c. Studi Dokumentasi

Catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan atau gambar. Menurut (Sugiyono, 2013) dokumentasi dalam penelitian dapat digunakan sebagai pendukung kredibilitas data yang didapat dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

Studi dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap dan verifikasi terhadap data dari wawancara dan observasi. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan terkait konservasi dan wisata alam, dokumen dari BPK dan Dinas Pariwisata, laporan kolaboratif, peta zonasi, arsip berita lokal, hingga resmi dari komunitas atau lembaga pengelola Maros–Pangkep.



2.6. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada *collaborative governance* dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sumpang Bitu Kabupaten Pangkep. Fokus ini diarahkan pada dua aspek utama, yakni bentuk kolaborasi antaraktor dalam kerangka triple helix dan faktor-faktor yang memengaruhi proses kolaborasi tersebut.

1. Kolaborasi Triple Helix

Kolaborasi dalam pengelolaan TWA Sumpang Bitu melibatkan beberapa aktor utama yang berperan sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya, yaitu:

- a. Pemerintah Pusat (Balai Pelestarian Kebudayaan Sulsel), yang berperan dalam merumuskan kebijakan, regulasi, dan memberikan pengawasan terhadap kawasan konservasi.
- b. Pemerintah Daerah, yang berperan dalam mendukung implementasi kebijakan, memberikan fasilitasi, dan memastikan adanya sinergi dengan kebijakan pusat.
- c. Masyarakat, yang berperan dalam menjaga kelestarian, memanfaatkan potensi wisata, serta berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan.

2. Faktor-Faktor yang memengaruhi Proses *collaborative governance* dalam pengelolaan TWA Sumpang Bitu tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu:

- a. Faktor Pendukung, yaitu segala hal yang membantu mendukung keberlangsungan kolaborasi.



or Penghambat, yaitu segala hal yang menjadi lala atau hambatan dalam menjalankan kolaborasi

aan TWA Sumpang Bitu

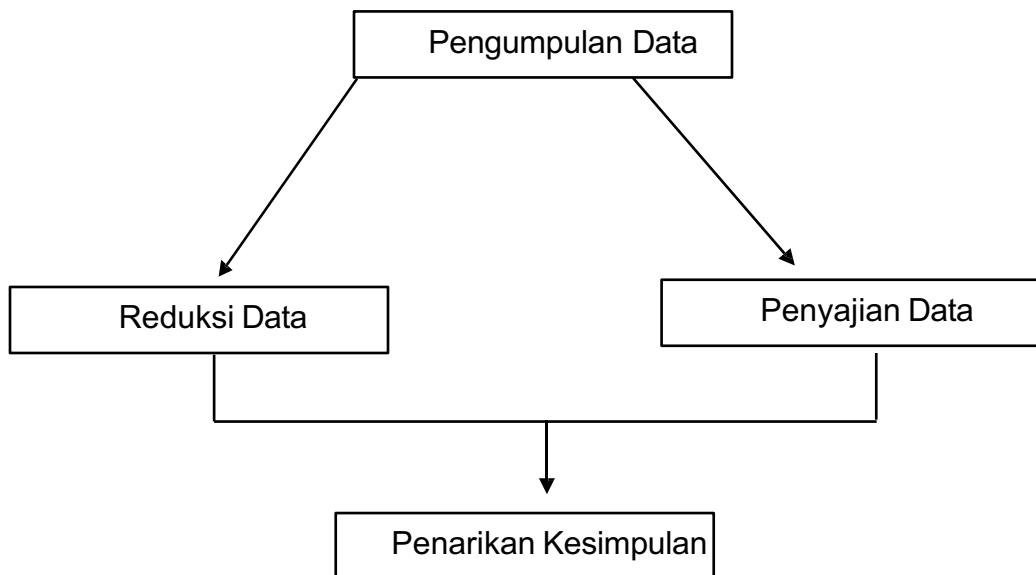
Bentuk kolaborasi triple helix dan faktor-faktor yang memengaruhinya bermuara pada praktik pengelolaan Taman Wisata Alam Sumpang Bitu. Pengelolaan ini menjadi pusat perhatian penelitian untuk melihat sejauh mana mekanisme collaborative governance dapat diterapkan dalam menjaga kelestarian, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong keberlanjutan kawasan wisata alam.

2.7. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, menurut Suwandi & Basrowi (2008 : 192), adapun data tersebut perlu ditipologikan ke dalam kelompok-kelompok dan disaring sedemikian rupa untuk menjawab masalah, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan berdasarkan identifikasi dari informan, baik yang bersumber dari observasi dan wawancara. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mengacu kepada beberapa tahapan analisis interaktif. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (dalam (Sugiyono, 2014);404) analisis interaktif terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:



Gambar 2. 1. Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Berdasarkan Pemikiran Miles dan Huberman

a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data atau informasi melalui wawancara terhadap informan kunci yang berkaitan atau selaras dengan penelitian dan disertai observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan sehingga mendapatkan data yang diharapkan.

b. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data untuk memilih informasi mana yang dianggap

tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat li lapangan.

data

ajian data merupakan kegiatan sekumpulan



informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam bentuk tabel maupun uraian penjelasan.

d. Penarikan Kesimpulan

Adapun proses penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir yang dilakukan secara cermat di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.



Optimized using
trial version
www.balesio.com